



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu korupsi, suap, pencucian uang, dan semua bentuk penggelapan uang negara hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama pemerintah Indonesia. Para aparatur negara yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat justru menjadi pelaku utama dari serangkaian kasus korupsi yang merugikan negara. Semua bentuk penyimpangan keuangan negara menjadi bencana laten yang memperlihatkan disorientasi politik dan mengedepankan kepentingan individu jauh melebihi kepentingan bangsa. Indonesia berada di jajaran negara dengan tingkat korupsi tinggi, meskipun ada penurunan peringkat negara terkorup dari tahun sebelumnya.

Transparency International (TI) merilis data mengenai situasi korupsi di 177 negara untuk tahun 2013 sebagaimana dapat diketahui dalam artikel berjudul “Indonesia Peringkat 64 Negara Paling Korup di Dunia” yang diakses melalui *metrotvnews.com* tanggal 10 Desember 2013 bahwa Indonesia menduduki peringkat 64 dalam urutan negara paling korup di dunia. Skor Indonesia yaitu 32 berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis TI. Peringkat itu menunjukkan Indonesia masih berhadapan dengan banyak kasus korupsi. Namun peringkat itu lebih baik dibandingkan tahun 2012 saat Indonesia menduduki peringkat 60 besar negara paling korup.

Data di atas menunjukkan bahwa ada perbaikan penanganan kasus korupsi dengan turunnya peringkat Indonesia ke posisi yang lebih baik pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan peringkat tersebut sedikitnya memperlihatkan adanya penanganan lebih baik dari perangkat negara yang mengurus permasalahan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin gencar mengungkap kasus-kasus korupsi. Walaupun ada penurunan peringkat menurut data dari lembaga Transparency International, pada kenyataannya tetap masih banyak laporan korupsi yang masuk dalam laporan KPK dan Kejaksaan Agung.

Penanganan perkara korupsi di Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagaimana diungkapkan Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung, Feri Wibisono, yang menyatakan dalam artikel berjudul “Korupsi di Indonesia Tertinggi Kedua di Dunia” yang diakses melalui *bisnis.com* tanggal 10 Desember 2013 bahwa penanganan perkara korupsi di Indonesia per tahun mencapai 1.600 hingga 1.700 perkara. Jumlah ini menduduki peringkat kedua di dunia setelah China yang mencapai 4.500 perkara. Perkara korupsi tersebut merupakan perkara yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Banyaknya jumlah penanganan kasus korupsi di Indonesia per tahunnya menunjukkan besarnya perhatian yang harus dicurahkan penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan maupun lembaga pemerintah lainnya untuk berkomitmen kuat dalam menekan tindak korupsi. Banyak kasus korupsi silih berganti terkuak, mulai dari level bawah hingga para elit politik. Bukan hanya sekadar oknum, korupsi jadi bukti nyata dari kebobrokan birokrasi Indonesia. Sikap kritis

masyarakat pada kasus korupsi seakan tidak mendapatkan dukungan penuh aparaturnegara ketika banyaknya kasus korupsi yang terselesaikan dengan antiklimaks.

Hukuman bagi para koruptor dianggap tidak memenuhi sikap keadilan dan tidak memenuhi semangat antikorupsi. Pemerintah dan aparaturnegara lainnya seakan tidak cukup kuat dalam menindak korupsi yang seakan telah membudaya di Indonesia. Masih banyaknya kasus korupsi yang diungkap KPK menunjukkan bahwa koruptor seakan tidak takut akan hukuman yang akan mereka terima, karena contoh-contoh kasus korupsi sebelumnya seakan antiklimaks dengan hukuman yang dianggap ringan. Antiklimaksnya penanganan korupsi di Indonesia juga semakin membuka peluang terjadinya kasus korupsi di berbagai lembaga pemerintahan, bahkan di lembaga hukum seperti Mahkamah Agung sekalipun.

Kasus korupsi yang tengah ramai dibicarakan publik saat ini menyeret nama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar yang kronologi penangkapannya dijelaskan dalam artikel berjudul “Ini Kronologi Penangkapan Akil Mochtar” yang diakses melalui *nasional.kompas.com* tanggal 10 Desember 2013 bahwa pada awal September 2013, KPK sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan AM selaku hakim MK. Dari pemantauan tersebut, lanjutnya, tampak Toyota Fortuner tiba di kediaman AM. Mobil ini diketahui dikemudikan oleh M, suami dari anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa. Tak lama kemudian, lanjutnya, tim KPK langsung masuk ke kediaman AM dan melakukan penangkapan terhadap Akil, Chairun Nisa, dan Cornelis. Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita

uang sekitar Rp 3 miliar yang terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS. Tak lama kemudian, KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Kasus penangkapan Akil Mochtar menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia. Pada satu sisi, pengungkapan kasus korupsi ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat pada KPK selaku lembaga anti korupsi yang semakin dijadikan tumpuan bagi pemberantasan korupsi. Di sisi lain, pengungkapan kasus Akil Mochtar semakin memperlihatkan banyaknya kasus korupsi di Indonesia, bahkan juga melibatkan para aparaturnegak hukum. Kasus Akil Mochtar layaknya kasus korupsi lainnya yang selalu menyita perhatian masyarakat karena kepentingan masyarakat juga ada dalam penyalahgunaan wewenang oleh para koruptor

Kasus korupsi mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat yang semakin membuka kesempatan bagi media massa untuk turut memenuhi kepentingan tersebut dengan gencarnya memberitakan kasus korupsi. Kasus korupsi yang selalu mendapat perhatian besar masyarakat juga diberitakan dengan begitu besarnya oleh media massa karena adanya nilai kepentingan sebagaimana diungkapkan Sobur (2012: 164) bahwa, “Ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, dalam diri media massa juga terselubung kepentingan yang lain, seperti kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan lapangan kerja bagi para karyawan dan sebagainya.”

Ketidakberpihakan bukan berarti tidak memiliki pilihan, karena bagaimana

pun juga media massa diisi oleh individu-individu yang memiliki cara pandang tersendiri. Perbedaan cara pandang, dukungan, dan juga pemahaman mengenai peristiwa yang diangkat wartawan ke dalam berita akan menunjukkan arah pilihan wartawan maupun institusi media massa dalam menunjukkan kepentingannya sebagaimana diungkapkan Eriyanto (2007: 27) bahwa “Pihak yang berkepentingan tersebut saling berpacu menggunakan media massa untuk menonjolkan klaim, konstruksi sosial dan definisi masing-masing tentang suatu peristiwa. Keputusan atau kecenderungan media juga dipengaruhi oleh sumber elit yang diwawancarai.”

Media massa seperti halnya surat kabar memiliki kemampuan untuk melarutkan pembaca dalam peristiwa dengan penggunaan bahasa yang dapat menggiring opini pembaca. Pembaca seakan disodori jalan yang telah diatur oleh wartawan karena bahasa merupakan sarana media massa membentuk opini publik. Surat kabar menjadi pembentuk realitas karena realitas bukan diceritakan apa adanya tetapi dibingkai agar dapat menunjukkan keutamaan berita yang disampaikan. Kemampuan surat kabar dalam membingkai berita merupakan wacana yang diatur dan menunjukkan jalannya realitas yang dikonstruksikan sebagaimana diungkapkan Bennett dalam Eriyanto (2007: 27) bahwa, “Media bukanlah sekadar saluran yang bebas, ia juga subjek media yang dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya.”

Aspek penekanan yang berbeda dari sebuah berita disebabkan oleh pemingkaian media massa yang memiliki tingkat subjektivitas tersendiri.

Penyajian peristiwa media massa dibingkai sedemikian rupa untuk semakin meningkatkan nilai pemberitaan. Pembingkaiian ini bukan hanya dibentuk untuk meningkatkan nilai berita, tetapi juga menggiring opini publik untuk semakin percaya dengan pemberitaan yang dilakukan sebagaimana diungkapkan Sobur (2012: 164) bahwa, “Pembingkaiian ini dilakukan supaya berita menjadi lebih menarik, lebih diingat dan tentu saja lebih bermakna. Cara pandang yang berbeda dipengaruhi banyak aspek, termasuk kebijakan redaksional yang tentu saja berbeda satu sama lain. Perbedaan kebijakan redaksional ini dapat menghasilkan teks berita yang berbeda meski peristiwa yang sama.”

Berita bukan hanya sekadar disampaikan tetapi juga dapat menciptakan makna. Berita menjadi kendaraan wartawan dan media massa dalam memberikan pemahaman kepada pembaca dan sekaligus dapat dimaknai arah dukungannya. Latar belakang wartawan dan lembaga media massa yang memberitakan, pemilik, dan bahkan kepentingan kelompok akan sangat mempengaruhi berita yang ditulis wartawan. Hal inilah yang akan mempengaruhi wartawan ketika ia memutuskan fakta mana yang akan ditulis dan fakta mana yang harus dibuang. Penonjolan fakta tersebut ditentukan wartawan untuk dapat membentuk berita sesuai dengan caranya dalam memilih kepentingan isi berita tersebut menunjukkan upaya pembingkaiian berita (*framing*).

Pembingkaiian berita menjadi cara wartawan untuk menyusupkan ideologi tertentu yang semakin memperkuat arah tujuan pemberitaan yang dilakukannya. Pembingkaiian berita wartawan atau media massa dapat dimaknai melalui analisis *framing*, di mana berita dimaknai sebagai sarana dalam melihat kontruksi realitas

sebagaimana diungkapkan Sobur (2012: 23) bahwa, “Analisis *framing* berfungsi melihat bagaimana realitas sesungguhnya itu dikemas media menjadi realitas media. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak.”

Penentuan isi berita juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan redaksional, ideologi, visi, dan misi media massa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemingkaiian berita ini akan melibatkan banyak kepentingan yang dapat merujuk pada adanya arah dukungan dalam pengadaan opini publik sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Hal-hal inilah yang menentukan kebijakan sebuah surat kabar sehingga dapat membedakan pemberitaan dalam surat kabar satu dengan yang lainnya. Seleksi isu dapat diterapkan guna merepresentasikan peristiwa yang diberitakan dalam kerangka referensi tertentu dengan berpedoman pada visi dan kebijakan editorial surat kabar. Jadi selain latar belakang wartawan, kebijakan redaksional surat kabar juga mempengaruhi berita yang disajikannya. Hasilnya pembaca akan menemukan satu peristiwa ditulis dengan cara dan isi yang berbeda di antara satu surat kabar dengan surat kabar lainnya.

Berita di Kompas dan Media Indonesia dipilih karena keduanya menempatkan berita penangkapan Akil Mochtar sebagai berita utama pada beberapa edisi yang sama. Pemilihan Kompas dan Media Indonesia sebagai objek penelitian juga tidak terlepas dari besarnya nama kedua surat kabar ini di Indonesia dan sama-sama memiliki cakupan distribusi secara nasional sehingga adanya kesetaraan di antara keduanya sebagai kompetitor. Kompas dan Media Indonesia sama-sama memberitakan kasus penangkapan Akil Mochtar, tetapi

dengan adanya kontruksi realitas yang dimiliki media massa menjadikan peristiwa penangkapan Akil Mochtar disampaikan dengan gaya dan cara yang berbeda, baik dari segi teknis pemberitaan maupun dari nilai isi beritanya. *Framing* dalam hal ini dapat menjadi cara dalam menilai surat kabar yang memiliki tendensi menyisipkan nilai-nilai tersembunyi dari fakta pemberitaan melalui upaya menonjolkan peristiwa sebagaimana diungkapkan Eriyanto (2007: 187) bahwa,

Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media massa dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Penonjolan aspek isu tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi wacana, seperti penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung atau memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi dan lain-lain.

Berita utama mempunyai fungsi *framing* berita yang kuat karena keberadaannya sebagai cerminan dari nilai berita yang kuat pada edisi tersebut diterbitkan. Untuk itu juga penelitian ini memfokuskan pada berita utama berita yang disajikan Kompas dan Media Indonesia dalam memberitakan kasus penangkapan Akil Mochtar. Penempatan peristiwa sebagai berita utama menunjukkan adanya aspek sintaksis dari wacana berita dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan mengenai pembingkaihan berita penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus suap pada berita utama di surat kabar Kompas dan Media Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu, “Bagaimana pembingkaihan peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus korupsi pada berita utama surat kabar Kompas dan Media Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembingkaihan peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus korupsi pada berita utama surat kabar Kompas dan Media Indonesia.

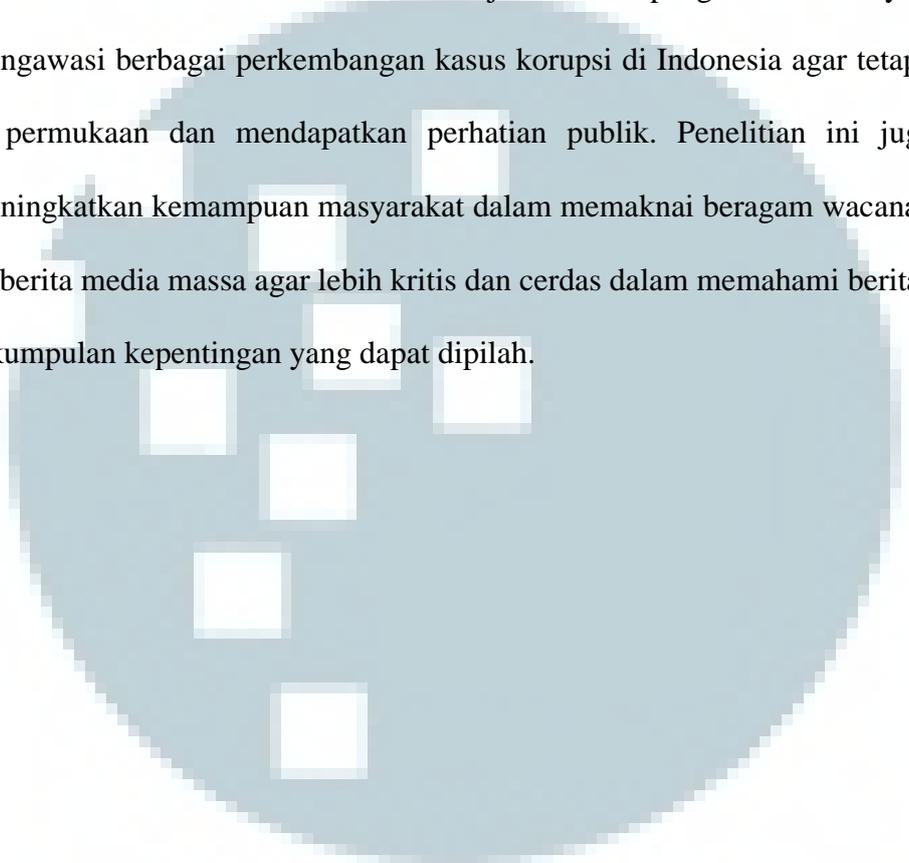
1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmiah bagi ilmu komunikasi khususnya ilmu jurnalistik dalam menggunakan analisis *framing* sebagai salah satu cara dalam memaknai arah keberpihakan media massa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pengembangan penelitian sejenis lainnya dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi segenap civitas program studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara dalam memahami makna teks berita yang dikemas media massa sebagai produk pewacanaan realitas yang terbentuk atas dasar kepentingan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi surat kabar Kompas dan Media Indonesia untuk turut menjadi media pengawas sosial yang turut mengawasi berbagai perkembangan kasus korupsi di Indonesia agar tetap muncul di permukaan dan mendapatkan perhatian publik. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memaknai beragam wacana di balik isi berita media massa agar lebih kritis dan cerdas dalam memahami berita sebagai sekumpulan kepentingan yang dapat dipilah.



UMMN